

## PENGEMBANGAN MODEL KONSERVASI LAHAN DAN SUMBERDAYA AIR DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh :  
Muharam

### Ringkasan

*Tantangan terbesar dalam menyelenggarakan ketahanan pangan adalah degradasi lahan dan lingkungan akibat ulah manusia dan gangguan alam. Akibat hal ini telah terjadi peningkatan lahan kritis di Indonesia, yang berakibat pada semakin meningkatnya kemiskinan khususnya di daerah-daerah lahan kritis.*

*Pemerintah telah mencoba mengupayakan rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan berbagai program rehabilitasi hutan, tanah, dan air. Keberhasilan program-program tersebut belum maksimal karena pendekatan pelaksanaan kegiatannya lebih dominan pada kegiatan penanganan hutan, tanah, dan air secara teknis, belum menyeluruh dengan melibatkan masyarakat miskin di sekitar hutan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan model konservasi lahan yang sekaligus juga bisa mengentaskan kemiskinan. Model tersebut adalah model konservasi yang mengaplikasikan kegiatan konservasi lahan dengan pembangunan fasilitas konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.*

*Implementasi kegiatan tersebut adalah dengan penanaman lahan kritis milik Negara yang digarap oleh masyarakat miskin dengan bantuan modal dan pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah. Tanaman yang ditanam meliputi tanaman konservasi seperti kayu-kayuan dan tanaman sela seperti sayur-sayuran dan palawija, serta bantuan ternak sebagai sumber ekonomi masyarakat miskin dan sumber pupuk bagi lahan kritis.*

---

\*) Dosen Konservasi Tanah dan Air Faperta UNSIKA

### Pendahuluan

Tantangan pembangunan pertanian di masa mendatang adalah penyediaan pangan bagi penduduk, yang lebih dikenal dengan istilah ketahanan pangan. Menurut UU Pangan Nomor 7 tahun 1996 pasal 1 ayat 17, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

Tantangan penyediaan pangan semakin hari semakin berat. Degradasi lahan dan lingkungan, baik oleh ulah manusia maupun gangguan alam, semakin meningkat. Lahan subur untuk pertanian banyak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Sebagai akibatnya kegiatan-kegiatan budidaya pertanian bergeser ke **lahan-lahan kritis** di sekitar DAS yang **memerlukan input tinggi dan mahal** untuk menghasilkan produk pangan per satuan luas.

Akibat pengelolaan yang tidak tepat, lahan kritis di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada tahun 2007 menurut Departemen Kehutanan **luas lahan kritis di pulau-pulau besar di Indonesia total 22.125.578,50 ha; agak kritis 41.954.362,28; sangat kritis 40.403.103,01 ha**. Sedangkan di pulau Jawa ( 6 provinsi) **luas lahan kritisnya adalah 994.788,57 ha; agak kritisnya 2.054.262,03 ; sangat kritisnya 1.121.315,09 ha, atau rata-rata 3,97% dari luas lahan-lahan kritis di Indonesia** Meluasnya

lahan kritis di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat
2. Perluasan areal pertanian yang tidak sesuai,
3. Perladangan berpindah
4. Padang penggembalaan yang berlebihan
5. Pengelolaan hutan yang tidak baik
6. Pembakaran yang tidak terkendali

Permasalahan utama yang dihadapi pada lahan kritis ini secara teknis adalah lahan mudah tererosi, tanah bereaksi masam, dan miskin unsur hara sehingga Tingkat produktivitasnya rendah. Ciri utama lahan kritis adalah gundul, berkesan gersang, dan bahkan muncul batu-batuan di permukaan tanah, topografi lahan pada umumnya berbukit atau berlereng curam (Hakim *et al.*, 1991).

Pada umumnya, kondisi penduduk yang tinggal di daerah tersebut relatif miskin, populasi padat, luas lahan kecil, kesempatan kerja terbatas dan lingkungan yang terdegradasi. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem pertanian berkelanjutan atau model konservasi dengan melibatkan penduduk dan kelembagaan.

Dampak lebih lanjut dari banyaknya lahan kritis dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah memunculkan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air di wilayah bawahnya. Permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya adalah :

1. Berkurangnya suplai air untuk wilayah hilir
2. Bahaya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau
3. Erosi dan sedimentasi di badan – badan air
4. Pencemaran air minum dan air sungai
5. Keterbatasan pangan di wilayah hulu sehingga meningkatkan kemiskinan di wilayahnya
6. Keterbatasan energy

Penanganan masalah lahan kritis atau konservasi lahan secara parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang kompleks dan juga tidak efisien ditinjau dari segi biaya. Pendekatan parsial seperti hanya untuk mengatasi masalah produktivitas tanaman saja, ternyata tidak berhasil, kegiatan seperti ini adalah ciri suatu kegiatan yang hanya berbasis komoditas. Untuk itu, penanganan harus diubah dengan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi lahan dan air melalui pendekatan holistik dengan fokus sumberdaya.

Hal ini maka diperlukan terobosan dengan mengembangkan program konservasi lahan dan sumberdaya air secara menyeluruh terkait dengan program-program pemerintah, yang ditujukan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada di sekitar lahan-lahan kritis atau lahan- lahan sekitar hutan dengan mengadopsi kearifan lokal yang menjadi sumber pertanian berkelanjutan sekarang ini. Sistemnya adalah dengan mencoba mengembangkan model konservasi lahan dan sumberdaya air yang cocok untuk wilayahnya. Sistem ini merupakan sistem usahatani konservasi dengan penataan usahatani yang stabil berdasarkan daya dukung lahan yang didasarkan atas tanggapannya terhadap faktor-faktor fisik, biologi, dan sosial ekonomis serta berlandaskan sasaran dan tujuan rumah tangga petani miskin dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

## **Profil Pengelolaan Konservasi Lahan dan Sumberdaya Air di Daerah**

### ***1. Permasalahan – Permasalahan Dalam Pengembangan Konservasi Lahan dan SDA***

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan konservasi lahan dan sumberdaya air di daerah pada umumnya adalah :

1. Tingginya tingkat perusakan lingkungan karena adanya kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS),
2. Tingginya kerusakan kawasan lindung dan kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya,
3. Belum berkembangnya pelaksanaan diversifikasi/penerapan integrasi perkebunan ternak dikawasan lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk,
4. Rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempertahankan proses-proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup,
5. Masih tingginya lahan kritis di luar kawasan hutan (654.796,67 ha) dan tanah kosong di dalam kawasan hutan (81.767,8 h) serta kerusakan mangrove di wilayah Pantai Utara (10.423 ha).
6. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar hutan,

7. Belum optimalnya fungsi hutan sebagai pengendali tata air atau sebagai perlindungan penyangga kehidupan.
8. Belum optimalnya pengelolaan hutan dalam aspek fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial.
9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan konservasi lahan dan sumberdaya air .
10. Sulitnya merubah prilaku masyarakat/petani peserta kegiatan, hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan bantuan keproyekan, tetapi tidak mementingkan hasilnya.
11. Kegiatan tanaman menanam seperti kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sangat tergantung pada cuaca/musim, sehingga kadangkala pelaksanaan di lapangan mundur dari jadwal yang telah ditentukan.
12. Kegiatan tanaman menanam seperti kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sangat tergantung pada cuaca/musim, sehingga kadangkala pelaksanaan di lapangan mundur dari jadwal yang telah ditentukan.
13. Masih terdapat kegiatan yang outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan biaya yang telah dikeluarkan, misalnya dalam kegiatan operasi pengamanan hutan.
14. Data dan informasi mengenai lahan kritis masih berbeda-beda antar instansi sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
15. Pengembangan aneka usaha kehutanan masih belum optimal sementara potensi aneka usaha kehutanan cukup besar.
16. Belum terpadu, efektif dan efisien dalam dalam konservasi lahan dan sumberdaya air .
17. Tingginya erosi dan sedimentasi di DAS.

## **2. Data Peraturan Perundangan terkait Konservasi Lahan dan SDA**

Peraturan perundangan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan pengembangan konservasi lahan dan sumberdaya air mengacu pada peraturan perundangan yang di keluarkan oleh Pemerintah. Peraturan tersebut adalah UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU no.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP no. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air. Sedang untuk perencanaan program landasannya adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di ketiga provinsi belum ditemukan adanya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengembangan konservasi lahan dan sumberdaya air.

Untuk penyusunan kebijakan tentang konservasi lahan dan SDA, umumnya di daerah (provinsi dan kabupaten) sudah tercantum mulai dari RPJM, Renstra, RKP dan RKAKL Daerah. Perhatian lebih lanjut harus ditekankan pada program dan anggaran yang disediakan oleh Daerah. Selain itu, juga implementasi program serta hasilnya, karena umumnya program-program konservasi lahan dan SDA seperti reboisasi dan penghijauan belum berhasil.

## **3. Kelembagaan Konservasi Lahan dan Sumberdaya Air**

Kelembagaan pengembangan konservasi lahan dan sumberdaya air di Daerah pada umumnya *leading* sektornya adalah Dinas Kehutanan. Dinas-dinas lainnya yang terkait adalah Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, BPLHD, Bappeda sebagai koordinator program.

Berdasarkan hasil pengamatan di Daerah beberapa instansi/organisasi yang terlibat dalam konservasi lahan dan SDA di hulu dan di hilir (sumberdaya air) sebagai berikut;

**Tabel 1.** Beberapa Instansi/Organisasi Terkait Kegiatan konservasi lahan dan SDA

No	Nama Instansi/ Organisasi	Kelompok Instansi/ Organisasi
----	---------------------------	-------------------------------

1	Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam	Instansi Pemerintah Pusat
2	Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS)	
3	Balai Besar Wilayah Sungai	
4	Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah Propinsi	Instansi Pemerintah Propinsi
5	Dinas Kehutanan Provinsi	
6	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi	
7	Balai PSDA WS Provinsi	
8	Biro Sarana Perekonomian Provinsi	
9	Perum Perhutani	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
10	Perum Jasa Tirta (Jabar /Jatim)	
11	Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan) Kabupaten	Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten
12	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten	
13	Bappeda provinsi dan kabupaten	Instansi Pemerintah Daerah
14	Panitia Tata Pengaturan air Sungai	Lembaga Koordinasi Sungai

Sumber : Data primer (diolah), 2009

### **Profil Masyarakat Miskin Pedesaan di Sekitar Lahan kritis a.**

#### ***Permasalahan kemiskinan***

- (1). Seseorang termasuk miskin kalau tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah anggota keluarga atau karena rendahnya produktivitas atau kombinasi keduanya
- (2). Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin lebih lanjut akan semakin sulit karena penduduk miskin yang tersisa adalah yang paling rendah kemampuannya untuk dapat menolong diri, semakin terpusat di kantong- kantong kemiskinan dan semakin sulit jangkauannya. Kebijakan yang berlaku umum karena semakin tidak efektif dan peran utamanya harus digantikan dengan kebijakan khusus yang langsung ditujukan kepada dan untuk orang miskin.
- (3). Keberhasilan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau orang miskin ditentukan oleh keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program anti kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus berisi pedoman-pedoman umum peningkatan perhatian kepada masalah- masalah kemiskinan.
- (4). Pada hakekatnya masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah yang lebih besar, yaitu masalah ketimpangan antar wilayah dan antar golongan penduduk. Masalah ketimpangan ini sangat rumit dan hanya dapat diatasi secara bertahap berkesinambungan. Ketimpangan sosial, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat merupakan masalah yang mendesak.

#### ***b. Faktor Penyebab Kemiskinan***

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu

- 1) Masalah-masalah sistem nilai (etos) dan kelembagaan infrastruktur,
- 2) Masalah- masalah struktural, khususnya keterbatasan penguasaan sumberdaya dan faktor produksi pertanian, serta kelimpahan tenaga kerja; dan
- 3) Masalah-masalah kebijakan dan pendekatan model pembangunan.

Fenomena kemiskinan buatan (atau pengaruh) lingkungan alam berpangkal dari sumberdaya alam yang gersang, misalnya tak mencukupi dalam mendukung hidup sejumlah penduduk yang bertambah dan hidup dari alam itu. Sedangkan fenomena kemiskinan buatan manusia (masyarakat sendiri), disebabkan oleh lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Ada struktur kemiskinan yang menjadikan sebagian orang miskin (lapisan bawah) sedang sebagian lain (lapisan atas) serba cukup, bahkan kaya, serba kuasa, mampu mengembangkan kekayaan yang sebagian berasal dari upaya nafkah golongan miskin. Ada juga fihak yang mengalihkan perhatian pada "budaya miskin" (miskin karena malas atau berciri negatif lain: fatalistik, cepat menyerah kalah). Sebaliknya golongan kaya mempunyai motivasi kuat dan sifat-sifat terpuji (positif) lainnya dan mencapai kesejahteraan tinggi.

**c. Profil Wilayah Masyarakat Miskin**

Lima faktor yang dianggap berkaitan langsung dengan fenomena kemiskinan wilayah pedesaan, yaitu (a) kapabilitas sumberdaya lahan yang rendah, (b) lokasi yang terisolir dan/atau terbatasnya sarana dan prasarana fisik, (c) keterbatasan penguasaan modal dan teknologi, (d) lemahnya kemampuan kelembagaan (formal dan non-formal) penunjang pembangunan di tingkat pedesaan, dan (e) masih rendahnya akses sosial masyarakat terhadap peluang-peluang "bisnis" yang ada.

**d. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah Lahan Kritis**

Pertambahan jumlah penduduk yang cepat menyebabkan pemerintah menghadapi situasi sulit yang menimpa masyarakat, khususnya pedesaan sekitar kawasan hutan. Hal ini terlihat dari kenyataan banyaknya potensi sumberdaya alam menjadi semakin terbatas; berkurangnya pemilikan lahan pertanian; dan nilai tukar yang semakin buruk antara hasil pertanian dengan hasil industri. Akibat dari keadaan ini terjadi proses pemiskinan sumberdaya manusia, jumlah kelompok miskin menjadi semakin banyak dan bahkan cenderung terjadi pada sebagian besar masyarakat pedesaan. Proses semacam ini disebut oleh *Geertz* "invulsi pertanian", yang merupakan proses pembagian kemiskinan. Masyarakat yang terjangkit penyakit involusi inilah yang mewarisi potensi sumberdaya yang kapabilitasnya rendah. Pada umumnya dalam jangka panjang akan menyebabkan para warganya tidak memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan, tidak memiliki keberanian menanggung resiko, kurang memiliki inisiatif, kurang memiliki kemampuan melihat potensi/peluang yang ada, buta informasi dan akhirnya dapat menjurus menjadi fatalis.

Proses pengentasan masyarakat dari fenomena involusi pertanian akan berhasil apabila terjadi pendinamisan masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, pola adaptasi baru akan dapat dilalui masyarakat apabila tidak ada perintang yang dapat menghambat terjadinya perkembangan tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila ada intervensi pemerintah secara langsung dan cukup intense, yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dengan jalan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Penanganan kemiskinan pada prinsipnya merupakan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sumberdaya alam yang tidak menguntungkan dan rendahnya akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang- peluang yang tersedia.

Oleh karena itu, sasaran pengentasan yang perlu diutamakan adalah :

- (a). Peningkatan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia, melalui jalur pelayanan pendidikan (transfer IPTEK), pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi.
- (b). Mengembangkan tingkat partisipasi kelompok masyarakat miskin dengan jalan membuka peluang-peluang usaha produktif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin.

Dengan mengacu kepada dua sasaran tersebut maka bantuan program pembangunan harus diberikan dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan penghasilan, kemampuan berusaha, upaya meringankan beban hidup masyarakat, pemenuhan prasarana dasar sosial, pemberian modal kerja melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk dapat digulirkan lebih lanjut dan pembangunan /rehabilitasi sarana dan

prasarana fisik yang menunjang kegiatan produktif, pemasaran hasil produksi pedesaan, dan perbaikan mutu lingkungan pemukiman hidup.

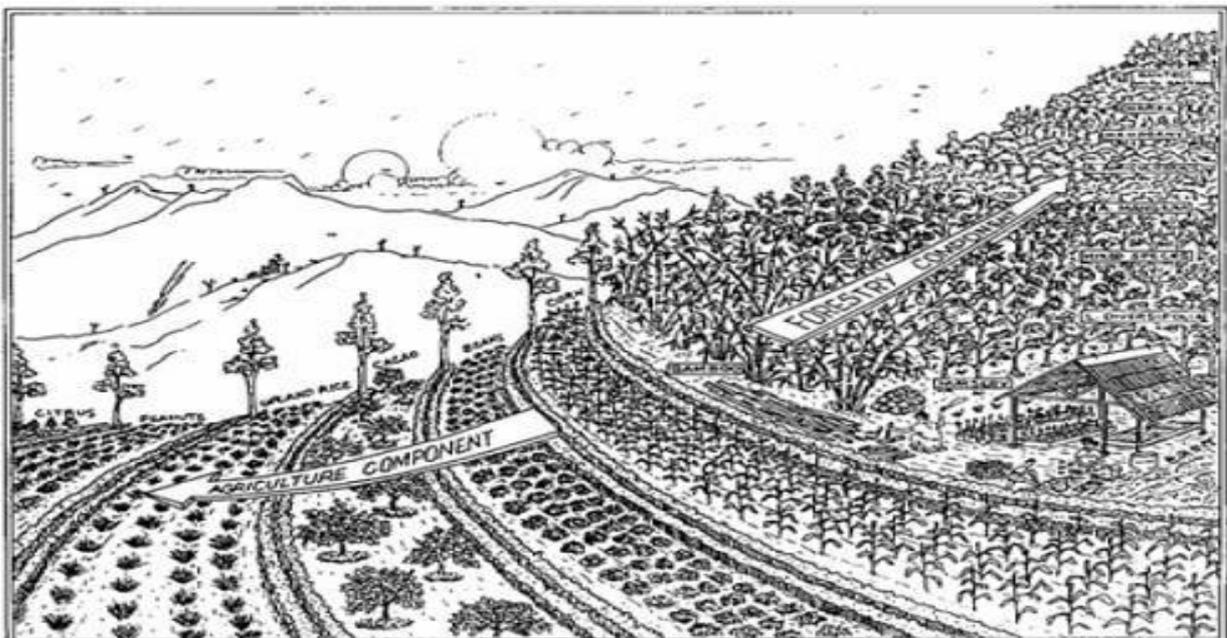
Usaha lain yang sedang dirancang Pemerintah pada awal PJPT II, yakni melalui konsep Program bantuan khusus untuk wilayah dengan kelompok masyarakat miskin yang cukup besar. Usaha Pemerintah pada kenyataannya masih menghadapi permasalahan, yakni (a) Kurangnya data aktual untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi kelompok miskin ; (b) belum diketahuinya proyek- proyek yang dibutuhkan untuk kelompok masyarakat miskin; (c) belum diketahuinya katagori kelompok sasaran yang relevan dengan jenis proyek yang akan diintroduksikan.

Dalam pengembangan model Konservasi lahan dan sumberdaya air dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka program implementasinya tetap harus dilaksanakan dengan peningkatan sumberdaya manusia petani dan peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan konservasi lahan dan SDA. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai bisa terjangkau karena dengan peningkatan sumberdaya manusia petani, maka kesadaran masyarakat meningkat, dan dengan peningkatan partisipasi petani dalam pembangunan, kesejahteraanpun akan meningkat.

Untuk menghadapi permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan khususnya pada masyarakat di sekitar wilayah lahan-lahan kritis, maka penyediaan informasi yang lengkap tentang profil sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan wilayah yang akan dijadikan *pilot project* mutlak diperlukan. Sehingga kesalahan – kesalahan masa lalu dalam program pengentasan kemiskinan tidak terulang lagi.

### **Pengembangan Model Konservasi Lahan dan SDA Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Daerah**

Dalam penerapan kegiatan konservasi tanah dan sumberdaya air skema umum atau standar yang digunakan adalah menerapkan kegiatan budidaya tanaman sesuai dengan peruntukan lahannya, sebagaimana diatur dalam aturan penataan ruang suatu wilayah. Pada daerah daerah tinggi dengan kelerengn yang tajam maka dijadikan sebagai kawasan lindung, kemudian daerah penyangga, dan terakhir adalah kawasan budidaya pertanian. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Implementasi di lapangan daerah – daerah penyangga bahkan hutan lindung sebagian digarap sebagai kawasan budidaya pertanian, sehingga terjadilah lahan – lahan kritis dan erosi yang berdampak pada kegagalan siklus hidro orologis dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Untuk memperbaiki hal tersebut maka dilakukan kegiatan konservasi tanah dan air, yang salah satu kegiatannya misalnya rehabilitasi

hutan, penerapan budidaya berbasis konservasi dan lain – lain. Untuk kawasan penyangga supaya berdampak social ekonomi lebih cepat maka diterapkan pola Perhutanan Sosial yang berbentuk Agroforestry, atau bentuk lainnya.

Pengembangan model konservasi lahan dan sumberdaya air yang akan diterapkan di daerah pada prinsipnya merupakan kombinasi dari jenis – jenis kegiatan konservasi yang biasa dilakukan, yaitu penerapan metode vegetatif yang dikombinasikan dengan metode teknis, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha tani di lahan kritis non budidaya tanaman. Pada umumnya skema model konservasi yang digunakan di daerah – daerah *pilot project* adalah adalah pola **Perhutanan Sosial** yang bentuknya **Agroforestry** yang dikombinasikan dengan kegiatan sipil teknis, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha.

Pola perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan/lahan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dengan mengusahakan tanaman non kayu di perhutanan tersebut sehingga akan terjadi interaksi sating menguntungkan. Sekali lagi pola ini bentuknya *Agroforestry* yang bisa berbentuk *Farm forestry*, *Agrosilviculture*, serta *Silvopasture*. Bentuk – bentuk model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

1. **Agroforestry** (Wanatani) merupakan pengelolaan/ Pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian
2. **Sivopasture** adalah salah satu bentuk *agroforestiy* yang merupakan sistem pengelolaan lahan untuk pengelolaan tanaman tahunan yang menghasilkan kayu dan atau buah-buahan dengan pemeliharaan ternak secara bersama

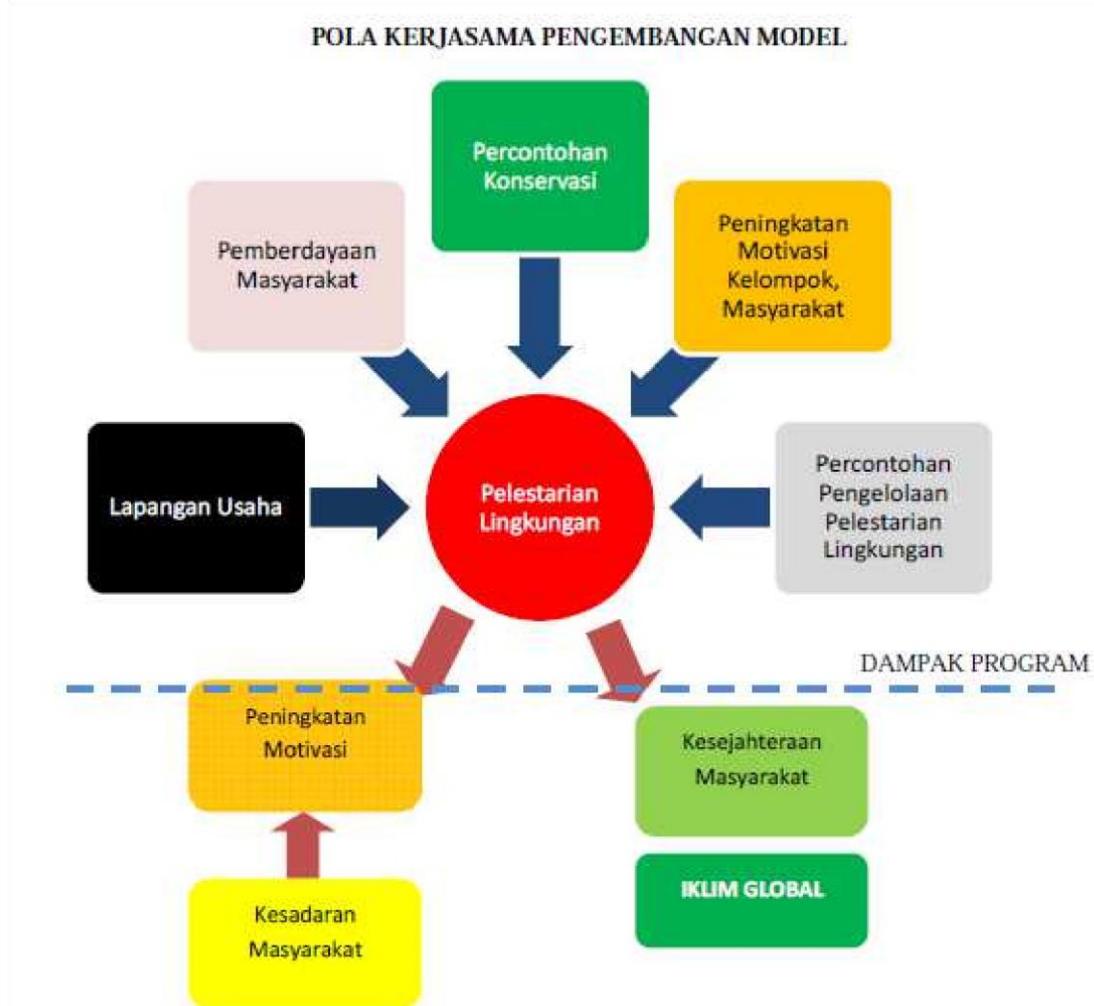
Beberapa contoh model yang akan dikembangkan dalam pengembangan konservasi lahan dan SDA yang sekaligus juga bisa mengetaskan kemiskinan masyarakat di daerah lahan – lahan kritis khususnya di Daerah salah satunya adalah sebagai berikut :

**a. Contoh Model Konservasi Lahan dan SDA yang bisa dikembangkan**

Untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di sekitar lokasi lahan kritis bisa dikembangkan pola baru dalam konservasi lahan, yakni model konservasi dengan Skema dasar **Agroforestry**. Model konservasi ini akan menanam tanaman konservasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan keinginan masyarakat, dan sebelum tanaman ini menghasilkan akan ditanam **tanaman sela (misalnya strawberry, tembakau, kubis, ketela)** serta **ternak** seperti **domba atau sapi** sebagai ketahanan ekonomi jangka pendek). Tanaman – tanaman konservasi yang bisa ditanam tersebut adalah **Kelengkeng, Kopi Arabica, Albasia, Suren, dan Jeruk Keprok** . **Model konservasi yang digunakan** dapat digambarkan pada skema di bawah ini.



Gambar 2. Skema pengembangan model konservasi dalam rangka pengentasan kemiskinan

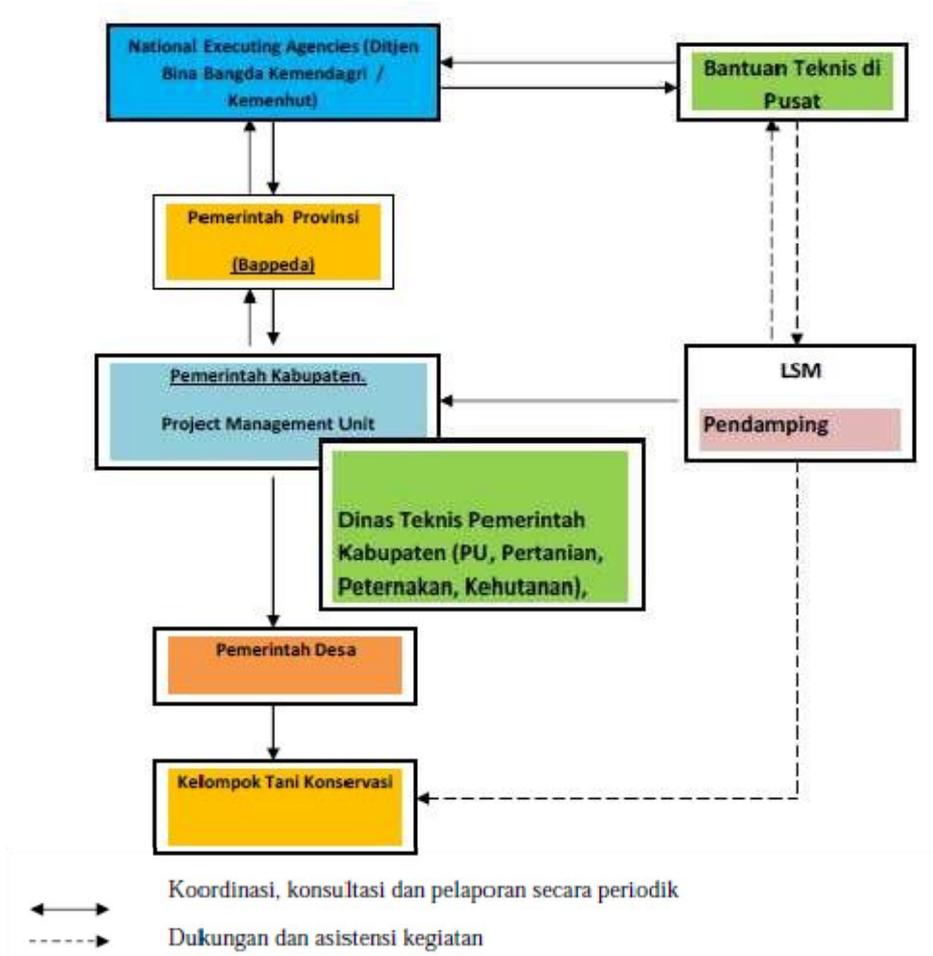


Sedangkan model kelembagaan serta kerjasamanya dapat dilihat pada skema di bawah ini :

***b. Kelembagaan Model***

Model kelembagaan yang akan dikembangkan adalah dengan membentuk sebuah organisasi di tingkat kabupaten (asosiasi petani pelaksanaan konservasi), kader penggerak di tiap kecamatan, dan kelompok-kelompok tani di tiap desa dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 – 15 petani. Secara umum gambaran pengelolaan konservasi dalam pengentasan kemiskinan dapat digambarkan sebagai struktur berikut :

Struktur Organisasi / kelembagaan Program Konservasi Lahan di daerah (Kabupaten) adalah sebagai berikut :



**c. Implementasi Model Konservasi yang digunakan**

Implementasi dari model konservasi lahan dan SDA dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Konservasi Di Lahan Milik Pemerintah Daerah**

- 1) Pembagian Lahan

Pembagian lahan di setiap lokasi akan disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin. Untuk meningkatkan pendapatan petani dalam rangka pengentasan kemiskinan diharapkan setiap 1 ha lahan kritis akan dikembangkan oleh 3-4 orang petani.

2) Peserta

Peserta kegiatan konservasi lahan dalam rangka pengentasan kemiskinan ini terdiri dari penduduk di sekitar lokasi, yaitu penduduk miskin, dan penduduk yang tergolong mampu dengan toleransi 10 %. Hal ini diusulkan agar petani yang tergolong mampu ini menjadi motor penggerak dan atau ketua kelompok bagi kelompok tani konservasi ini .

3) Jenis Bantuan

- hibah pedesaan : Bibit, Pupuk, Embung sebagai sumber air.
- Ternak
- Peralatan,

4) Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang diusulkan untuk program konservasi lahan antara lain Kelengkeng, Jeruk Keprok, Suren, Albasia, Kopi dan Jati.

5) Jenis Kegiatan Penunjang

Pelatihan ketrampilan dan bimbingan teknis lapangan.

6) Jenis Kegiatan Ekonomi

Pemberian modal kerja untuk mengembangkan home industri dan peternakan domba.

7) Pembagian Hasil Budidaya

Setelah tanaman konservasi menghasilkan maka dibelakukan pembagian hasil budidaya tanaman konservasi sebagai berikut :

- petani 60 %, kelompok 20 %, Pemda 20 % atau
- petani 50 %, kelompok 30 %, Pemda 20 %

## 2. **Konservasi di Lahan Masyarakat**

1) Jenis Bantuan

Bantuan yang diberikan berupa bibit dan pupuk.

2) Jenis kegiatan kelompok masyarakat

Konservasi di lahan di daerah tangkapan air.

## 3. **Jenis Kegiatan yang Diusulkan**

Adanya dana stimulant bagi kelompok masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk melestarikan lingkungan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang bisa diambil dari makalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan lingkungan telah terjadi dimana-mana akibat perusakan hutan, dengan tingkat perusakan hutan yang bervariasi.
2. Dampak kerusakan lingkungan ini di samping menimbulkan kerusakan ekosistem (banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau serta bencana lainnya) juga meningkatkan masyarakat miskin di sekitar lahan kritis.
3. Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan (konservasi lahan dan sumberdaya air) selama ini lebih diarahkan ke arah upaya teknis, yang kurang melibatkan masyarakat miskin, sehingga keberhasilannya kurang optimum.

4. Perlu dikembangkan model upaya konservasi lahan dan sumberdaya air dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mengaplikasikan antara kegiatan konservasi di lahan kritis, pembangunan fasilitas konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan.

#### **Saran – Saran**

1. Perlu sosialisasi pengembangan model konservasi dalam rangka pengentasan kemiskinan terhadap dinas instansi terkait yang mengelola program-program konservasi lahan (Pelestarian hutan, tanah, dan air).
2. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi dan penyadaran public oleh dinas instansi terkait, Perguruan Tinggi, dan LSM untuk memelihara hutan, tanah, dan air dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sebagai penjaga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pengelolaan DAS Ciliwung. 1997. Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering di Indonesia, Kumpulan Informasi, BP DAS, Bogor.
- Bappeda Jawa Barat. 2000. Evaluasi Sistem Pengendalian Banjir, Kertas Kerja, Bappeda Jabar, Bandung.
- C. Yudilastianto dan Tony Widiyanto. Konsep Lembaga Pengelolaan DAS Tingkat Lokal dan Regional di DAS Saddang-Bilawalanae, Sulawesi Selatan.
- Dede Rohmat. 2007. *Blue Print* KTPE DAS Citanduy Kabupaten Ciamis, Bappeda, Ciamis.
- Download internet, 29 Oktober 2009: [http://www.rudycct.com/PPS702-ipb/03112/sitti\\_marwah.htm](http://www.rudycct.com/PPS702-ipb/03112/sitti_marwah.htm).
- Download internet, 29 Oktober 2009: [http://www.rudycct.com/PPS702ipb/04212/andi\\_rahmadi.htm](http://www.rudycct.com/PPS702ipb/04212/andi_rahmadi.htm).
- Dinas PKT Kabupaten Cianjur. 2009. Data Lahan Kritis Setiap Kecamatan Kabupaten Cianjur,
- Hidayat Pawitan dan Daniel Murdiyarso. 1995. Monitoring dan Evaluasi Komponen Biofisik DAS, Lokakarya Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Garut, 20-24 November 1995.
- I. Nyoman Yuliarsana. 2000. Agroforestry Dalam Pengelolaan DAS, Agenda dan Strategi Studi dan Penelitian, Bahan Kuliah Pascasarjana IPB, Program Studi Pengelolaan DAS, PPS IPB, Bogor.
- Hakim, N. Yusuf N, Lubis, Nugroho S.G., Saul R, Amin Diha, Go Ban Hong, Bailey. 1986. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Unila, Lampung.
- Perhutani Unit III Jabar. 2005. Implementasi PHBM di Jawa Barat, Perhutani Unit III Jawa Barat, Bandung.

Robert J. Kodoatie, 2002. Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Otonomi Daerah, Andi Yogyakarta.

Robert J. Kodoatie, dan Roestam Sjarief., Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu, Andi Yogyakarta, 2005.

Tarigan S.D. 2000. Bahan Kuliah Teknologi Pengelolaan DAS, Pascasarjana, IPB, Bogor.

**Peraturan-peraturan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2006 tentang Pembagian Urusan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No, 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.7 tahun 2006 tentang Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah